



Sultan Perintahkan Tutup "Daycare" Tak Berizin

Kasus kekerasan seperti yang terjadi di tempat penitipan anak Little Aresha, Kota Yogyakarta, tak boleh terulang lagi. "Daycare" tak berizin pun akan ditutup.

YOGYAKARTA, KOMPAS — Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu untuk menutup semua tempat penitipan anak (*daycare*) yang tidak mengantongi izin. Hal ini untuk mencegah peristiwa seperti yang terjadi di tempat penitipan anak Little Aresha, Kota Yogyakarta, terulang lagi di masa depan.

Instruksi gubernur itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY Erlina Hidayati Sumardi seusaia rapat koordinasi yang dipimpin Sultan di Kota Yogyakarta, Selasa (28/4/2026).

Hadir pula dalam rapat itu Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

Erlina mengungkapkan, Sultan memberikan beberapa arahan dalam rapat menyikapi kasus kekerasan terhadap anak di tempat penitipan anak (TPA)

Little Aresha yang terungkap pada Jumat (24/4) itu. "Beliau memberi arahan supaya hal ini pertama kali terjadi dan tidak boleh terjadi lagi," ucapnya.

Untuk itu, Erlina mengatakan, pemerintah kabupaten/kota di DIY diminta segera melakukan penyesiran terhadap TPA di daerah masing-masing. Jika menemukan TPA yang beroperasi tanpa izin, pemkab/pemkot diperintahkan untuk langsung menutupnya.

Setelah itu, pengurus atau pengelola TPA tak berizin tersebut dipanggil untuk mengurus perizinannya. Perizinan dan pengawasan TPA berada di bawah kewenangan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Sejauh ini, Erlina mengungkapkan, tercatat 217 TPA yang telah mengantongi izin yang tersebar di lima kabupaten/kota di DIY. "Kami belum mendapatkan data berapa banyak yang belum berizin," ucapnya.

TPA Little Aresha yang bermasalah tersebut merupakan salah satu yang tak berizin. Hal

ini diketahui setelah kasus kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan pengurus dan pengasuh TPA tersebut terungkap.

Lebih jauh, Erlina mengatakan, untuk TPA yang sudah berizin, gubernur meminta dilakukan pengawasan yang lebih ketat. Hal ini terutama terkait pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak di TPA tersebut.

Menurut Erlina, gubernur juga meminta jajaran dinas terkait untuk membuat prosedur standar operasi TPA yang lebih detail dan lengkap. Selama ini, hal tersebut salah satunya sudah diatur oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA).

"Ini untuk memastikan layanan yang diberikan *daycare* harus memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak," ujarnya.

Belum berizin

Hasto Wardoyo mengatakan, hasil pendataan di Kota Yogya-

karta mencatat 68 TPA yang beroperasi di ibu kota DIY tersebut. Dari jumlah itu, 37 TPA sudah berizin dan 31 TPA belum berizin.

Dari jumlah TPA yang belum berizin itu, banyak yang operasinya digabungkan dengan unit pendidikan anak usia dini (PAUD) dan atau taman kanak-kanak (TK). Padahal, seharusnya setiap penyelenggaraan pendidikan itu memiliki izin sendiri-sendiri.

Mengikuti instruksi gubernur, Hasto mengatakan, pihaknya akan menutup sementara TPA yang tak berizin tersebut sambil menunggu pengelola mengurus perizinannya. Pemerintah Kota Yogyakarta pun akan proaktif membantu perizinan tersebut.

"Karena tidak semua TPA itu buruk. Banyak TPA yang bisa dipercaya juga dan dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Kasus yang mencuat di TPA Little Aresha beberapa hari lalu menjadi perhatian luas publik. Tempat penitipan anak itu digerebek polisi pada Jumat (24/4)

karena diduga melakukan kekerasan dan tindakan tak manusiawi terhadap puluhan anak yang dititipkan di fasilitas tersebut.

Berdasarkan penyelidikan aparat Polresta Yogyakarta, 53 anak yang kebanyakan berusia di bawah tiga tahun mengalami kekerasan dari para pengasuh. Salah satunya tangan dan kaki anak-anak diikat selama berada dalam penitipan.

Anak-anak itu juga ditempatkan di ruangan yang sirkulasi udaranya minim dan melebihi kapasitas daya tampung.

Polisi pun telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah *daycare*, dan 11 pengasuh.

Kepala Polresta Yogyakarta Komisaris Besar Eva Guna Pandia, Senin (27/4), mengatakan, tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka dapat bertambah seiring masih terus bergulirnya penyelidikan.

(ENG)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 18 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005